

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Analisis Kebijakan Publik

a. Pengertian Analisis

Dalam proses penentuan kebijakan, analisis adalah merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan. Peran analisis dalam proses penentuan kebijakan ialah sebagai salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan suatu program dengan kebijakan yang dibuat. Tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis memiliki arti proses investigasi atas sebuah fenomena guna melihat dengan keadaan yang faktual.

Sebagai mana diungkapkan oleh E.S Quade (dalam Dunn 2000: 95) analisis dalam pengertian yang paling universal adalah proses penggunaan intuisi dan pengungkapan sebuah pendapat yang meliputi tidak hanya uji atas sebuah kebijakan dengan memilih-milih pada sejumlah komponen tapi juga rancangan dan inti-inti atas alternatif yang baru. Analisis merupakan serangkaian proses penelitian guna memaparkan penjelasan atau mengungkapakan sebuah sudut pandang mengenai masalah-masalah dan isu yang telah diantisipasi hingga melakukan proses evaluasi secara menyeluruh. Ada beberapa analisis yang bersifat tidak formal yang artinya melalui serangkaian proses pemikiran yang sulit dan teliti, tetapi ada juga penelitian yang bersifat formal melalui perhitungan matematis dan sistematis.

Dalam sebuah penelitian, analisis dibagi menjadi dua macam yaitu analisis secara kualitatif dan analisis kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dapat berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data dalam analisis kualitatif berupa informasi, penjelasan dalam bentuk Bahasa, prosa yang akan dihubungkan dengan data pendukung lainnya guna memperoleh penjelasan dan membenaran atau sebuah skema yang baru atau yang telah ada sebelumnya. Sebaliknya, data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah kumpulan informasi dalam bentuk angka untuk memperoleh keterangan dan penjelasan dari jumlah-jumlah atau perbandingan beberapa skema hingga diperoleh skema yang baru, yang nantinya akan diuraikan kembali dalam bentuk kalimat.

Maka dapat dirangkum dari beberapa penjelasan diatas, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses olah data yang bersumber dari sebuah penelitian untuk menilai keadaan yang faktual yaitu guna melihat sejauh mana level keberhasilan dalam proses tata kelola program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berlandaskan pada 7 prinsip tata kelola dalam petunjuk teknis pengelolaan BOS.

b. Pengertian Kebijakan

Dijelaskan oleh Wirawan (2011: 16) program yang bersifat universal dalam program pelaksanaan suatu fungsi dan tugas menteri dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan. Sebuah kebijakan akan terus dilakukan hingga terbentuknya kebijakan yang baru dibuat, pada umumnya sebuah kebijakan lama akan digantikan dengan kebijakan baru jika kebijakan yang lama dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini atau perubahan rezim yang terjadi pada suatu negara. Kebijakan memiliki fungsi sebagai wadah guna menciptakan sistem sebuah nilai bangsa pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Muchlis Hamid, 2014). Diambil dari Dunn, Muchlis Hamdi (2014: 121) sebuah kebijakan dapat dinilai tepat jika memenuhi ciri sebagai berikut:

1. Efisien yang artinya berhubungan dengan pertanyaan mengenai sejauh mana usaha yang harus dilakukan guna mencapai hasil yang diharapkan
2. Efektif yang artinya apakah efek yang diinginkan dapat tercapai
3. Kecukupan yang artinya pertanyaan mengenai sejauh mana mencapai efek yang diinginkan telah menyelesaikan sebuah permasalahan
4. Keadilan yang artinya memiliki kaitan dengan biaya dan manfaat yang akan disebarkan secara adil antara elemen-elemen yang ada

c. Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki makna sebagai sebuah kebijakan yang dibuat guna diimplementasikan pada masyarakat. Kebijakan publik adalah putusan yang dihasilkan oleh pemerintah an sebuah negara guna mencapai sebuah visi dan misi yang telah ditetapkan oleh bangsa itu sendiri (Riant Nugroho, 2008). Kebijakan publik dihasilkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif dalam suatu negara. Disebutkan oleh Thomas Gye (dalam Suharsono, 2008:2) kebijakan public merupakan opasi yang dipilih oleh pemerintah guna melaksanakan ataupun tidak melaksanakan (public policy is whatever governments choose to do or not to do). Makna dari ungkapan tersebut adalah sebuah kebijakan dihasilkan badan pemerintahan dan bukan pihak swasta, kebijakan berhubungan dengan opsi yang akan dilakukan dan tidak dilakukan. Dipaparkan oleh Muclis Hamdi kebijakan sebagai struktur tindakan yang diimplementasikan oleh pemerintah dan direalisasikan dalam sebuah peraturan perundang-undangan dalam sebuah pelaksanaan pemerintahan negara. Dapat dilihat dari paparan sebelumnya makan terdapat beberapa karakter utama yang dimiliki oleh sebuah kebijakan yaitu, arah dan tujuan dari sebuah kebijakan public adalah penyelesaian dari sebuah masalah yang ada, kebijakan public digunakan sebagai struktur tindakan yang dijelaskan dalam rencana dan kegiatan, dan dalam sebuah kebijakan publik mengandung hukum positif. Di Indonesia sendiri salah satu kebijakan yang telah dihasilkan adalah kebijakan tentang sistem pendidikan.

Kebijakan publik dalam aspek pendidikan adalah kebijakan pendidikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Riant Nugroho (2008: 37) kebijakan pendidikan sebagai bentuk kebijakan publik dalam bidang pendidikan guna mencapai sebuah tujuan dari pembangunan bangsa dan negara secara menyeluruh. Dijelaskan pula dalam Margareth E Goertz kebijakan sangat berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran suatu negara. Masalah ini cukup dianggap genting saat masyarakat mulai memkoreksi dan mengkritisi biaya pendidikan.

Berkenaan dengan masalah tersebut, program BOS adalah salah satu kebijakan yang dihasilkan untuk bidang pendidikan. Program tersebut dirancang Pemerintah Indonesia dibawah pengawasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi sasaran adalah seluruh masyarakat Indonesia pada usia sekolah.

d. Konsep Kebijakan Publik

1) Definisi Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan yaitu sebuah kegiatan terpelajar dan praktis dengan tujuan guna menghasilkan, secara seksama menilai, dan menginformasikan ilmu yang ada dalam proses kebijakan (William Dunn, 2000). Sedangkan menurut Muchlis Hamdi (2014: 114) analisis kebijakan adalah proses menyatukan beberapa informasi yang diperoleh dari beberapa hasil penelitian yang bertujuan untuk menyusun suatu format bagi pengambilan keputusan kebijakan dan sebagai sarana untuk melihat kebutuhan di masa yang akan datang mengenai informasi yang berkaitan dengan kebijakan. Sebagaimana dipaparkan oleh E.S Quade (dalam Dunn 2000: 95) analisis kebijakan ialah suatu model analisis yang menghasilkan sajian informasi yang memberikan acuan dari proses pembuatan kebijakan dalam mengambil sebuah kebijakan.

2.1.2 Fungsi Analisis Kebijakan

Fungsi analisis kebijakan dapat di kategorikan ke dalam 3 kelompok besar yaitu (Nanang Fattah, 2013):

- a. Fungsi analisis kebijakan yang memiliki fokus pada proses menentukan agenda analisis kebijakan disebut fungsi alokasi
- b. Fungsi analisis kebijakan yang memiliki fokus pada dimensi rasionalisasi guna memperoleh informasi secara teknis untuk pertimbangan selama proses pengambilan keputusan pendidikan disebut fungsi inkuiri
- c. Fungsi komunikasi adalah metode-metode atau prosedur yang efisien guna menginformasikan hasil dari analisis kebijakan yang memiliki dampak dalam proses pembuatan keputusan

2.1.3 Level Analisis Kebijakan

Dijelaskan dalam Pearson (dalam Muchlis Hamdi, 2014: 126) analisis kebijakan diklasifikasikan pada beberapa level:

a. Analisis Meta (*meta analysis*)

Analisis meta adalah analisis yang dilakukan untuk analisis. Artinya, berhubungan dengan kegiatan analisis yang didasari pemahaman terhadap gagasan bahwa kebijakan publik dilakukan dengan menggunakan metafora

b. Analisis Meso (*meso analysis*)

Analisis meso adalah analisis yang mendefinisikan masalah, penentuan agenda dan penyusunan kebijakan. Yang menjadi fokus dalam analisis ini adalah bagaimana kerangka dan bentuk masalah

c. Analisis Keputusan (*decision analysis*)

Analisis keputusan adalah analisis yang berfokus terhadap proses penyusunan keputusan dan analisis kebijakan guna proses penentuan kebijakan. Analisis tersebut erat kaitnya dengan skema bagaimana sebuah keputusan atau rangkaian keputusan diambil

d. Analisis Pelaksanaan (*delivery analysis*)

Analisis pelaksanaan adalah analisis yang dilakukan terhadap penerapan, evaluasi dan efek dari sebuah perubahan. Analisis ini berhubungan dengan arah dari pelaksanaan sebuah proses kebijakan yang dilapisi oleh usaha memodelkan satuan perangkat sekuensi rasional.

Maka dalam penelitian kali ini, level analisis yang relevan digunakan yaitu analisis pelaksanaan. Penelitian ini akan melakukan analisis mengenai pelaksanaan dalam tata kelola program Bantuan Operasional Sekolah yang dilandaskan pada 7 prinsip pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah

e. Analisis Pengelolaan

Asal kata pengelolaan adalah dari kata administrasi atau manajemen. Pengelolaan adalah seni yang mengatur rangkaian proses yang memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber daya lain secara efisien dan efektif guna mencapai hasil tertentu (H. Malayu S.P, 2007). Menurut M. Manullang (2005: 5) manajemen adalah ilmu dan seni-seni merencanakan, mengorganisasikan, menyusun, mengarahkan, serta mengawasi sumber daya guna mencapai tujuan yang telah dibuat. Keadaan finansial dalam sekolah dianggap sangat vital karena seluruh kegiatan sekolah memerlukan pendanaan untuk meningkatkan kualitas dalam proses kegiatan belajar mengajar. Tata kelola keuangan dalam sekolah yang baik dapat dilaksanakan melalui asas pemisahan tugas, rencana, proses pembukuan dari tiap transaksi, pelaporan, dan pengawasan. Menurut Mulyono (2010: 172) tujuan daripada pengelolaan pendidikan khususnya untuk sekolah adalah sebagai berikut:

1. Adanya garansi bahwa dana yang sudah dianggarkan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan harian sekolah dan kelebihan dana yang ada akan digunakan sebagai investasi
2. Guna melakukan pemeliharaan barang-barang di sekolah
3. Adanya pengawasan bahwa proses penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran dana yang ada diketahui dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah merupakan salah satu contoh pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Untuk memaksimalkan kepentingan peserta didik yang ada dana BOS harus digunakan secara efektif sebagai salah satu sumber pendanaan yang diterima pihak sekolah dari pemerintah. Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS ada guna mengatur pengguna dana BOS pada tiap sekolah penerima. Petunjuk Teknis memuat 7 prinsip utama untuk melakukan pengelolaan dana BOS dengan menggunakan konsep MBS yang harus ditaati oleh pihak sekolah. Analisis

diperlukan guna melihat sejauh mana pihak sekolah melakukan pengelolaan dana BOS. Fungsi analisis pengelolaan sendiri adalah untuk membuat parameter dan level keberhasilan dari pelaksanaan sebuah program yang telah diselesaikan.

2.2 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMK

a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

1) Dasar Hukum

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMK memiliki dasar hukum yang disebutkan dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah tahun 2019 terdiri dari:

- a) Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945
- b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- f) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah dengan perubahan terakhir Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah
- g) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)
- h) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga
- i) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2015 Nomor DIPA-023.12.1.666053/2015 tanggal 14 November 2014

2) Pengertian

a) Pengertian BOS

Dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009, definisi Bantuan Operasional Sekolah adalah serangkaian rencana atau program dari pemerintah yang memiliki tujuan untuk menyediakan dana biaya operasional nonpersonal bagi instansi pendidikan dasar sebagai wujud dari realisasi program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini yang dimaksud standar biaya operasional nonpersonal yaitu satuan biaya standar yang digunakan untuk memenuhi biaya program kegiatan operasional nonpersonal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang merupakan bagian dari seluruhnya dana pendidikan yang berguna agar satuan pendidikan mampu melaksanakan program pendidikan secara berkesinambungan sesuai Standar Nasional Pendidikan

b) Pengertian BOS SMK

Dalam Petunjuk Teknis BOS tahun 2019, BOS didefinisikan sebagai rangkaian program yang dibuat pemerintah berupa penyaluran dana secara langsung ke pihak sekolah dalam hal ini adalah SMK baik Negeri ataupun Swasta yang mana besaran dari dana bantuan tersebut akan dikalkulasi dengan dasar jumlah siswa pada tiap sekolah dikalikan satuan biaya (*unit cost*) bantuan. Sedangkan dana Bantuan Operasional Sekolah SMK sendiri adalah dana bantuan yang ditujukan untuk membantu Sekolah Menengah Kejuruan baik yang Negeri maupun Swasta dalam memenuhi biaya operasional sekolah nonpersonal

2.3 Tujuan BOS SMK

Tertulis dalam Petunjuk Teknis BOS tahun 2019 tujuan BOS SMK diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Merealisasikan penyediaan layanan pendidikan yang dapat dijangkau dan memiliki mutu baik bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia merupakan tujuan BOS SMK secara universal. Selanjutnya berikut ini adalah tujuan khusus dari Bantuan Operasional Sekolah SMK yaitu:

- a) Bantuan biaya operasional sekolah nonpersonal
- b) Meminimalkan jumlah angka putus sekolah bagi siswa SMK
- c) Peningkatan Angka Penilaian Kasar (APK) bagi siswa SMK
- d) Wujud dari sikap pemerintah yang berpihak bagi para siswa SMK dengan memberikan keringanan biaya sekolah
- e) Membuka peluang bagi para siswa SMK untuk memperoleh layanan pendidikan yang dapat dijangkau dan memiliki mutu yang baik
- f) Peningkatan kualitas dari proses pembelajaran di sekolah

2.4 Penggunaan Dana

Dana BOS diperuntukkan membantu pemenuhan dari kebutuhan operasi dari kegiatan nonpersonalia disekolah. Peraturan Mendiknasi Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional Nonpersonalia untuk SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB mengatur mengenai penggunaan dana BOS SMK. Berikut ini merupakan peruntukan penggunaan dana BOS SMK menurut Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional Non Personal yaitu:

Tabel 2.1
Penggunaan Dana BOS

No	Peruntukan Dana	Penjelasan
1	Pembelian/penggandaan buku modul pelajaran	Biaya untuk mengganti buku yang rusak dan menambah buku referensi maupun buku teks pelajaran
2	Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran	Pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses pembelajaran
3	Penggandaan soal dan penediaan lembar jawaban ujian dan ulangan bagi siswa	Terdiri dari ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian umum, dan ujian sekolah
4	Pembelian alat pendidikan	Alat yang tidak termasuk golongan aset, antar lain pembelian: alat untuk praktik IPA, praktik IPS, praktik Bahasa, alat tangan (<i>handtools</i>) dan alat peraga kesenian
5	Pembelian bahan untuk praktikum/bahan yang sifatnya habis pakai	Terdiri dari: bahan bauk praktik IPA, bahan praktik IPS, bahan praktik Bahasa, bahan praktik komputer, bahan praktik kejuruan, dan bahan olahraga/kesenian, tinta printer
6	Pengadaan kegiatan bina siswa/ekstrakurikuler	Biaya untuk mengadakan kegiatan pembinaan siswa

		melalui kegiatan ekastrakurikuler yang terdiri dari: pramuka, PMR, kegiatan bina olimpiade sains, seni dan olahraga
7	Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi	Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi bagi siswa siswi yang akan lulus dari SMK
8	Penyelenggaraan praktik kerja industri/ Praktik Kerja Lapangan di dalam negeri	Biaya guna memfasilitasi praktik kerja industri/lapangan bagi siswa SMK, diantaranya biaya perjalanan dinas guna memperoleh sarana praktik/bimbingan/pemantauan siswa praktik
9	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah	Biaya untuk pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah guna meningkatkan mutu sana dan prasarana di sekolah agar lebih baik
10	Langganan daya dan jasa lainnya	Biaya guna membayar langganan daya dan jasa/kekurangan lain untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar, sebagai contoh: listrik, telepon, air, internet,
11	Penerimaan siswa baru (PSB)	Biaya untuk mengadakan form pendaftaran dan administrasi pendaftaran meliputi biaya penggandaan dan konsumsi panitia
12	Pengembangan sekolah rujukan	Membiayai perjalanan dinas pada pertemuan yang diadakan oleh Direktorat atau membahas pengembangan sekolah rujukan di wilayah atau konsumsi dalam sebuah rapat sekolah yang membahas program aliansinya
13	Peningkatan mutu proses pembelajaran	Membiayai pembelian bahan/komponen material untuk praktik perakitan atau pengembangan e-book, mendatangkan guru/pengajar tamu yang professional, menambah dan meingkatkan praktik berulang kali
14	Operasional sekolah berbasis TIK	Meliputi pembiayaan pembuatan, pengembangan, dan pemeliharaan website resmi sekolah dan biaya pendukung dan pendataan DAPODIKMEN

15	Pelaporan	Biaya guna melakukan penyusunan dan pengiriman laporan sekolah kepada pihak terkait meliputi biaya fotocopy dan konsumsi penyusunan laporan
----	-----------	---

Sumber: Petunjuk Teknis BOS SMK Tahun 2019

Lebih lanjut, penggunaan dana BOS SMK juga dapat dialokasikan guna melakukan pembiayaan sebagai berikut:

- a) Alokasi biaya guna mendampingi siswa SMK yang menjalankan kurikulum 2013
- b) Alokasi guna melakukan pembelian berupa makanan ringan atau makanan berat dalam kegiatan rapat yang mengusung topik terkait dengan pengembangan atau pelaksanaan program sekolah
- c) Pembayaran jasa dari seseorang yang professional guna melakukan peningkatan dan pemeliharaan ringann fasilitas sekolah juga dibebankan pada dana BOS

2.5 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SMK

Disebutkan dalam Petunjuk Teknis BOS SMK Tahun 2019, kepala sekolah memiliki kewajiban membentuk panitian guna melakukan pengelolaan terhadap dana BOS ditingkat sekolah. Panitia tersebut dibentuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komite sekolah, dan guru. Berikut ini adalah susunan panitia yang mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah:

- a) Kepala Sekolah berperan sebagai penanggung jawab program Bantuan Operasional Sekolah di SMK
- b) Wakil kepala sekolah atau guru yang berkompentensi akan berperan sebagai ketua panitia pelaksanaan program
- c) Guru sebagai penanggung jawab
- d) Bendahara rutin sekolah atau bendahara yang ditunjuk secara khusus oleh kepala sekolah sebagai pengelola keuangan

Dalam pengelolaan dana BOS harus memperhatikan aspek berikut:

- a) Komite sekolah memiliki tugas memberikan dukungan dalam wujud bantuan tenaga atau ide, pengawasan mutu terlaksananya program, dan mediator antara pemerintah dengan masyarakat
- b) Patuh dan taat terhadap aturan dan ketentuan yang berhubungan dengan proses pelaksanaan program bantuan
- c) Informasi mengenai pelaksanaan program harus dapat diakses oleh warga sekolah atau dengan membuat poster pelaksanaan kegiatan yang ditempel pada papan pengumuman

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memiliki beberapa tolok ukur dalam pengelolaan dana BOS SMK yang terdiri dari:

- a) Swakelola dan Partisipatif
Program Bantuan Operasional Sekolah dilaksanakan dengan prinsip swakelola yang artinya disusun, dilaksanakan, dan dikontrol sendiri oleh pihak sekolah dengan partisipasi warga sekolah dan masyarakat secara keseluruhan guna memberikan dukungan terhadap susunan, pelaksanaan, dana pengendalian yang sesuai dengan peraturan yang ada
- b) Transparan
Dana BOS dalam hal pengelolaannya harus dilaksanakan secara terbuka sehingga seluruh warga sekolah dan masyarakat memiliki ruang untuk melakukan pengawasan dan pengendaliann mengajukan kritikan dan saran terhadap pelaksanaan program

- c) Akuntabel
Seluruh dana BOS yang dikelola harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, yang mengacu pada pedoman pelaksanaan yang telah disetujui bersama
- d) Demokratis
Penyusunan rencana, penentuan keputusan, dan penyelesaian masalah dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dan memberikan peluang bagi tiap orang yang terlibat untuk menyampaikan saran, kritikan, serta pendapat
- e) Efektif dan efisien
Penggunaan dana harus dilakukan secara efektif dan efisien. Siswa yang menerima bantuan berupa pembebasan/pengurangan biaya sekolahnya melalui seleksi yang dilakukan secara cermat agar tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
- f) Tertib administratif dan pelaporan
Bagi sekolah yang menerima bantuan dana BOS wajib membuat susunan dan menginformasikan laporan dari hasil pelaksanaan kegiatan dan tanggungjawab atas keuangan yang sesuai ketentuan yang telah disampaikan
- g) Saling Percaya
Antara pemberi dana dan penerima dana harus didasari rasa saling percaya saat melakukan penyerahan dana. Maka dari itu, harus saling dimengerti oleh semua pihak agar saling menjaga komitmen yang tujuan utamanya adalah melakukan pengembangan pendidikan yang lebih berkualitas

b. Sekolah Menengah Kejuruan

Dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan menengah di Indonesia terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Satuan Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) Pendidikan menengah kejuruan yaitu pendidikan pada jenjang menengah yang memiliki fokus pada pengembangan bakat siswa guna menjalankan berbagai macam pekerjaan tertentu sehingga dapat dengan mandiri memasuki dunia kerja. Pendidikan menengah kejuruan hanya diselenggarakan di tingkat lanjutan atas, yaitu Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK), dan Sekolah Teknik Menengah (STM). Saat ini, pendidikan kejuruan lanjutan atas disebut dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

2.6 Prinsip Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah

Anggota guru dan komite sekolah menerima dana dari program Bantuan Operasional Sekolah secara penuh dan harus mengelola dana tersebut secara mandiri. Sehingga adanya program Bantuan Operasional Sekolah akan memberikan dukungan terhadap realisasi dari penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, yang tujuan umumnya adalah mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah melalui pemberian otonomi, adanya ruang yang lebih luas agar sekolah dapat mengelola sumber dayanya, serta menstimulus para warga sekolah agar turut serta dan masyarakat umum guna melakukan peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar di sekolah

a. Swakelola dan Partisipatif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari swakelola adalah pengelolaan yang dilakukan sendiri. Dalam hal ini swakelola yang dimaksud adalah pengadaan barang dan jasa secara mandiri dari pemerintah. Dipaparkan oleh Abu Sopian arti swakelola adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa yang telah direncanakan, dijalankan dan dipantau secara mandiri oleh pemerintah penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah yang lain atau kelompok masyarakat.

Keikutsertaan masyarakat merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah. Keikutsertaan menjadi penting karena melalui

hal tersebut masyarakat menjadi lebih memiliki dan ikut bertanggung jawab, sedangkan meningkatnya tanggung jawab akan meningkatkan pula kontribusi dari masyarakat itu sendiri. Partisipasi adalah sebuah prinsip bahwa setiap individu agar terlibat secara langsung dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (Loina Lalolo, 2003). Dalam hal ini keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Sebagai mana dipaparkan oleh Engkoswara (2012: 295) partisipasi memiliki arti sebuah proses yang mana pemangku kepentingan berperan secara aktif selama proses pengambilan keputusan, proses penyusunan kebijakan, pembuatan rencana, implementasi, dan pengendalian/evaluasi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Lewat dewan sekolah, wali siswa, dan masyarakat memiliki kesempatan dalam proses pembuatan keputusan. Sehingga, masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih dan pengawasan serta turut membantu pihak sekolah dalam melakukan pengelolaan kegiatan belajar mengajar. Kontribusi masyarakat dalam melakukan pengelolaan kegiatan sekolah memiliki kemungkinan akan memunculkan tumpeng tindih kepentingan antar sekolah, wali siswa, dan masyarakat. Sehingga perlu adanya pembatasan keikutsertaan tiap unsur lebih jelas dan tegas (Mulyasa, 2009: 28).

b. Transparan

Kegiatan manajemen sekolah dijalankan secara transparan, para anggota mudah melakukan akses, manajemen menyajikan laporan secara berkelanjutan sehingga para pemangku kepentingan mampu melihat sejauh mana proses dan hasil dari penetapan keputusan dan kebijakan di sekolah. Transparansi dalam melakukan manajemen sekolah berdampak pada meningkatnya kepercayaan dan keyakinan pemangku kepentingan terhadap kredibilitas dan citra sekolah yang menerapkan pemerintahan yang baik dan bersih. Transparansi merupakan sebuah prinsip akan jaminan akses atau kebebasan tiap individu guna mendapatkan informasi mengenai terselenggaranya sebuah pemerintahan, yang mencakup informasi mengenai kebijakan, proses penyusunan keputusan, dan pelaksanaan serta hasil yang diperoleh (Krina, 2013: 14). Sebagaimana dipaparkan oleh Krina, terdapat dua aspek prinsip dalam transparansi yaitu komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat memiliki hak agar dapat mengakses informasi tersebut. Kebebasan dalam mendapatkan informasi merupakan landasan utama dalam melakukan transparansi. Masyarakat dan warga di sekolah dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan kepentingan bersama secara langsung. Dana BOS akan dikelola secara terbuka hal ini bertujuan agar para warga sekolah khususnya dan masyarakat pada umumnya dapat memberikan saran, kritik, dan melakukan pengendalian serta pengawasan terhadap jalannya program tersebut.

Berikut ini merupakan parameter yang dapat digunakan dalam melakukan prinsip transparansi (Krina, 2003: 13):

- 1) Skeman yang memberikan jaminan mengenai sistem keterbukaan dan standarisasi dari seluruh kegiatan pelayanan publik
- 2) Skema yang memberikan fasilitas mengenai pertanyaan publik yang berhubungan dengan macam-macam kebijakan dan pelayanan publik, maupun seluruh kegiatan pada lembaga sector publik
- 3) Skema yang memberikan sarana pelaporan maupun penyebaran informasi maupun tindakan menyimpang yang dilakukan oleh aparat publik dalam kegiatan bermasyarakat

c. Akuntabel

Dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 pasal 59, akuntabilitas memiliki prinsip yang akan dilaksanakan melalui pemberian tanggungjawab atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara atau instransi pendidikan kepada para pemangku kepentingan pada instansi tersebut yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan tanggungjawab atas suatu tata kelola

aktivitas secara ekonomi serta efisien kepada pemberi tanggung jawab (Mardiasmo, 2009: 20). Sedangkan untuk ukuran pendidikan dikatakan akuntabel jika (Nanang Fattah, 2013: 93):

- 1) Memiliki arah dan tujuan yang jelas sehingga dapat dikelompokkan menjadi tujuan yang lebih khusus
- 2) Adanya pengawasan atas sebuah kegiatan yang berlangsung sehingga dapat mengarah pada tercapainya sebuah tujuan
- 3) Hasil yang diperoleh akan efektif karena tujuan telah tercapai
- 4) Meningkatkan sumber daya yang tersedia sehingga proses tercapainya tujuan menjadi lebih efektif
- 5) Sebagai saran untuk menyempurnakan dilakukam skema umpan balik

Sekolah dalam melakukan kegiatannya dituntut menerapkan akuntabilitas meningkat sekolah merupakan sebuah organisasi sector publik, sehingga pertanggung jawaban bukan hanya vertikal tetapi juga horizontal. Dalam organisasi sektor publik terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus ada yaitu (Mardiasmo, 2002: 21):

- a) Akuntabilitas hukum dan akuntabilitas kejujuran
- b) Akuntabilitas proses
- c) Akuntabilitas program
- d) Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas menuntut dua hal yaitu (Krina, 2003: 9):

- 1) Kemampuan menjawab

Kemampuan ini berkaitan dengan berbagai tuntutan para aparat guna memberikan jawaban secara kerkelanjutan tiap pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana mereka menggunakan hak mereka, meingat bahwa sumber daya telah dialokasikan dana apa yang telah dicapai menggunakan sumber daya tersebut

- 2) Konsekuensi

d. Demokratis

Dari Bahasa Yunani Kuno demokratis berasal dari dua kata yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan, dimana jika kedua kata tersebut digabungkan memiliki makna kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat (Tarcov dalam Dede Rosyada, 2004: 15). Dalam sebuah penelitian politik, demokratis memiliki makna bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam kehidupan politik mekanisme demokrasi tidak seluruhnya sama dengan demokrasi di instansi pendidikan, tetapi secara khusus sekolah yang menjunjung demokrasi adalah mengimplementasikan kekuatan demokrasi kedalam proses perencanaan, tata kelola, dan penilaian dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dalam rangka membangun yang demokratis terdapat beberapa keadaan yang harus di kebangkan yaitu (James A Beaned an Michael W Appel, 2004: 15):

- 1) Agar informasi yang terima maksimal maka akses terhadap gagasan dan ide harus mudah diakses oleh semua orang
- 2) Adanya kepercayaan pada orang-orang dan kelompok dengan kemampuan yang mereka punya guna menyelesaikan berbagai masalah di sekolah
- 3) Menyampaikan kritik sebagai hasil dari analisis selama proses penyampaian penilaian terhadap gagasan, masalah, dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan sekolah
- 4) Adanya empati terhadap kondisi kesejahteraan individu lain dan terhadap masalah yang berkembang di masyarakat
- 5) Adanya empati terhadap nilai diri, hak-hak tiap individu, dan hak-hak minoritas
- 6) Adanya pemahaman bahwa demokrasi yang berkembang saat ini belum menggambarkan demokrasi yang sesuai, makan dari itu demokrasi harus terus senantiasa berkembang dan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup seluruh manusia
- 7) Adanya lembaga/institusi yang secara periodic mampu mempromosikan dan melakukan pengembangan bagaimana cara hidup demokrasi

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa inti dari teori tersebut adalah jika sekolah yang demokratis akan dapat direalisasikan jika seluruh informasi yang dianggap penting dapat diakses oleh pemangku kepentingan sekolah jadi seluruh elemen dapat memiliki pemahaman terhadap arah pemembangan, apa saja persoalan atau kesulitan yang sedang di hadapi serta cara-cara yang sedang atau akan dilaksanakan. Maka dari itu dapat dilakukan analisis relevansi sebuah kebijakan, pemahaman, pengajuan kritik, pemberian saran, serta menentukan sumbangsih dan keikutsertaan yang akan diberikan guna keberhasilan pelaksanaan program sekolah tertentu.

e. Efektif dan Efisien

Efektivitas adalah adanya keselarasan diantara individu yang menjalankan tugas dengan tujuan yang akan dicapai dan bagaimana sebuah instansi mampu mengoptimalkan dan memperoleh manfaat sebuah sumber daya dalam rangka merealisasikan tujuan operasional (Mulyasa, 2005: 82). Dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan pengertian diatas, bahwa efektivitas merupakan keterkaitan antara terselesaikannya seluruh tugas pokok, tercapainya sebuah tujuan yang telah di tetapkan, ketepatan waktu pelaksanaan sebuah program, adanya peran serta para anggota secara aktif. Sebagaimana dipaparkan oleh Mulyasa (2005: 89) jika tujuan dapat dikatakan efektif jika diraih secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Efisien didasari oleh pengeluaran ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh sebuah organisasi (Mulyasa, 2005: 89). Mulyasa juga memberikan penjelasan jika efisien adalah sebuah perbandingan antara input dan output yang dihasilkan, tenaga yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh, income yang masuk dan outcome yang dikeluarkan, biaya dan kepuasan yang dihasilkan.

f. Tertib Administrasi dan Pelaporan

Dipaparkan oleh Sutarto (1982: 14) yang di maksud dengan administrasi adalah keseluruhan rangkaian dari kegiatan penataan dari pekerjaan utama yang dijalankan oleh segolongan individu dalam hal melakukan kerja sama guna memperoleh tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Administrasi akan dibagi kedalam beberapa klasifikasi golongan sebagai berikut (Sutarto, 1982: 9) yaitu:

- 1) Dilaksanakan oleh segolongan individu
- 2) Terjalin sebuah kerjasama
- 3) Memiliki kesamaan tujuan yang akan dicapai

Ilmu administrasi keuang merupakan salah satu dari cabang ilmu administrasi menurut Sutarto (1982: 58). Ilmu administrasi keuangan sendiri mempelajari tentang seluruh rangkaian dalam melakukan tata kelola dan susunan penganggaran, penetapan sumber daya berupa biaya, cara mengalokasikan dan menggunakan, pembukuan dan pertanggungjawaban atas pembiayaan dalam sebuah hubungan kerjasama segolongan individu guna memperoleh tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pendapat dari Sutarto (1982: 68) bahwa ilmu administrasi adalah pencatatan seluruh kegiatan penerimaan dan kegiatan pengeluaran biaya dalam hubungan kerjasama. Kajian dari cabang ilmu tersebut melahirkan sebuah pengetahuan yang universal dan penting dengan sebuah pembukuan.

Laporan keuangan adalah proses pencatatan dan ringkasan seluruh kegiatan transaksi guna menghasilkan informasi akuntansi untuk para pemangku kepentingan (Reeve, 2008: 22). Sedangkan dipaparkan oleh Suwardjono (2005: 20) pelaporan keuangan dari organisasi nonbisnis seperti sekolah memiliki sebuah tujuan utama yaitu harus menyajikan informasi yang memiliki manfaat bagi para pemberi pendanaan dan pengguna lainnya, baik informasi yang sifatnya berjalan ataupun informasi potensial, guna menentukan kebijakan-kebijakan yang relevan mengenai penggunaan anggaran dana organisasi tersebut. Pelaporan keuangan memiliki tujuan yang spesifik yaitu:

- 1) Menyajikan informasi guna memfasilitasi para pemberi dana dan pengguna lainnya pada penilaian jasa yang disajikan oleh organisasi serta kemampuannya untuk menyediakan jasa lainnya secara berkelanjutan
- 2) Menyajikan informasi guna memfasilitasi para pemberi dana dan pengguna lainnya guna memberikan penilaian tentang para manajer di organisasi nonbisnis apakah telah menunaikan tugas dan tanggungjawab mereka untuk mengurus organisasi tersebut serta hal-hal lainnya
- 3) Menyajikan informasi mengenai sumber daya, kewajiban, dan aset bersih organisasi, dan efek yang timbul dari tiap transaksi, sebuah kejadian, serta situasi yang mengubah sumberdaya dan ha katas sumberdaya tersebut
- 4) Menyajikan informasi mengenai kinerja organisasi dalam satu periode waktu tertentu
- 5) Menyajikan informasi mengenai cara organisasi memperoleh dan menggunakan kas atas sumber likuid lain, mengenai kredit dan pelunasannya, serta menengai hal yang berdampak pada likuiditas sebuah organisasi
- 6) Pelaporan keuangan wajib memuat keterangan-keterangan dan interpretasi guna memberikan bantuan bagi para pengguna untuk memiliki pemahaman informasi yang ada

Sebagaimana dimuat dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah SMK Tahun 2019, perlu dilakukan penyusunan dan penyajian laporan dari hasil proses suatu kegiatan guna membuat pelaporan keuangan organisasi. Bagi sekolah yang menerima dana BOS SMK adalah wajib menyusun pelaporan dari penggunaan dan pengelolaan dari dana yang telah diserahkan yang wujudnya adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan suatu program.

g. Saling Percaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, percaya memiliki makna yaitu bahwa sesuatu memang benar adanya dan nyata terjadi, serta anggapan atau keyakinan bahwa yang dikatakan oleh seseorang adalah jujur. Maka arti percaya dalam kajian kali ini adalah keyakinan pada individu atau golongan yang turut serta dalam melakukan pengelolaan dana BOS ini jujur dan mampu diberi kepercayaan dalam menjalankan tugasnya. Kepercayaan dalam aspek ini berarti pihak wali siswa mempercayai pihak sekolah melalui kepala sekolah guna melakukan pengembangan kegiatan-kegiatan sekolah agar dapat memberikan peningkatan mutu yang diharapkan serta kepala sekolah akan memberikan kepercayaan kepada dewan guru guna melakukan pengembangan kegiatan belajar mengajar dan mengorganisir seluruh pelaksanaan kegiatan. Kepercayaan juga termasuk adanya rasa saling percaya antara pihak sekolah dengan pemerintah selaku pemberi dana BOS guna melakukan pengelolaan dan penyaluran dana bantuannya.

2.7 Penelitian yang Relevan

- 2.7.1 Penelitian yang telah diselesaikan oleh Hani Fitria pada tahun 2014 yang mengangkat judul Efektivitas Pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan pada SMK PGRI Pandaan yang menarik kesimpulan bahwa pengelolaan terhadap dana BOS menggambarkan hasil yang efektif. Perhitungan ini ditunjukkan dengan adanya perolehan perhitungan yang mencakup indikator tepat sasaran dengan nilai rata-rata 3,67, indikator sosialisasi program juga menunjukkan hasil yang efektif dengan perolehan perhitungan rata-rata 3,62, indikator tujuan program menunjukkan perhitungan hasil yang juga efektif dengan perolehan hasil rata-rata 3,55 dan indikator pemantauan program juga dinyatakan efektif dengan perolehan hasil perhitungan rata-rata 3,47. Jika dibuat dalam bentuk prosentase, maka penelitian yang dilakukan pada SMK PGRI Pandaan sudah efektif dalam hal pengelolaan dana BOS yaitu sebesar 71,6%

Jadi kesamaan yang relevan dengan penelitian kali ini adalah variabel yang dibahas mengenai tata kelola Bantuan Operasional Sekolah. Tetapi yang membedakan dengan penelitian ini adalah indikator yang digunakan dalam pengelolaan dana BOS. Dalam

penelitian yang dilakukan oleh Hani Fitria yang diuji adalah efektivitas dari pengelolaan dana BOS yang mengacu pada tercapainya sebuah sasaran, tujuan dan pemanfaatan program sedangkan penelitian kali ini yang dinilai adalah keberhasilan dari pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang didasari pada 7 prinsip pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019

2.7.2 Penelitian yang telah diselesaikan oleh Ega Rezky Hastyarini pada tahun 2015 yang mengangkat judul Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SMA (BOS SMA) yang dilakukan pada SMA Negeri 1 Pejagon, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah pada Tahun 2014 yang menghasilkan (1) Perencanaan dana BOS yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Pejagon dengan membuat susunan RKAS yang dilakukan oleh tim pembuat anggaran sekolah, yang mana tim tersebut diketahui oleh Komite Sekolah, Guru dan Karyawan, serta para Wali Siswa. RKAS ini disusun bersamaan dengan proses penyusunan RAB BOS SMA. (2) Pelaksanaan dan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah SMA dibagi menjadi 2 tahapan. Proses pengambilan dana BOS ini dilakukan oleh bendahara BOS yang dibentuk oleh tim BOS itu sendiri. Dana BOS akan digunakan guna memenuhi pembiayaan seluruh kegiatan operasional sekolah yang sifatnya nonpersonalia sebagaimana yang telah tercantum dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah SMA. (3) Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten melakukan pengawasan serta evaluasi internal, sedangkan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan eksternal adalah Dinas Pendidikan Provinsi. (4) Dana BOS SMA akan dilaporkan tiap semester lewat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah SMA termasuk lampiran yang ada. Sedangkan untuk publikasi akan dilakukan dengan cara menempelkan rangkuman RKAS pada papan pengumuman serta memberikan selebaran yang berisikan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah kepada wali siswa.

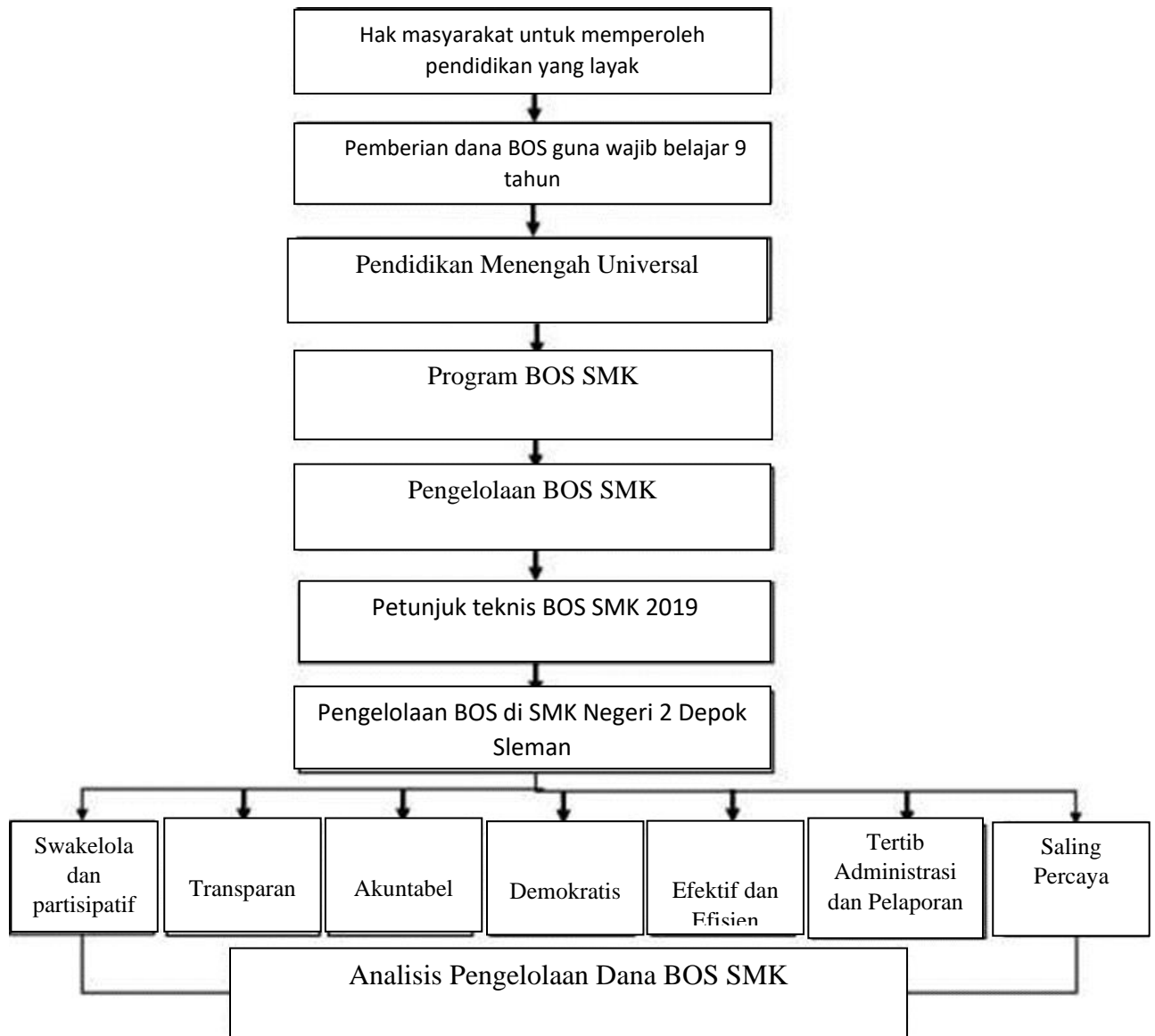
Persamaan yang relevan dengan penelitian kali ini adalah tujuan guna mendeskripsikan atau menjelaskan tata kelola Bantuan Operasional Sekolah. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian kali ini adalah subjek penelitian dari Ega Rezky Hastyarini adalah SMA serta penelitian ini menggunakan indikator perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi serta pelaporan dana.

2.8 Kerangka Berpikir

Salah satu aspek penting dalam terlaksananya program pendidikan adalah biaya pendidikan guna mencapai tujuan daripada pendidikan itu sendiri. Masalah yang sangat krusial dalam proses pembiayaan kegiatan pendidikan adalah bagaimana tercukupinya kebutuhan investasi, operasional dan personal sekolah dan bagaimana memberikan jaminan kepada masyarakat dalam hal ini khususnya adalah masyarakat yang tergolong dalam ekonomi lemah guna memiliki kesetaraan hak untuk turut merasakan kualitas dan mutu pendidikan yang dikatakan layak mulai dari level Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menanggapi hal ini memberikan solusi yaitu dengan cara memberikan bantuan dana yang sering disebut Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ditujukan pada sekolah-sekolah terdaftar. Agar tercapainya tujuan dari program wajib belajar 9 tahun, maka pemerintah memberikan bantuan tersebut mulai dari tingkat SD sampai SMP. Program wajib belajar 9 tahun dapat dikatakan sebagai program yang berjalan dengan sukses, namun fakta yang terjadi di masyarakat masih banyak sekali siswa lulus SMP terpaksa putus sekolah dan tidak mampu lagi mengenyam bangku pendidikan yang lebih tinggi lagi yaitu SMA. Guna menanggapi fenomena tersebut, pemerintah mencetuskan dan melaksanakan sebuah program yang disebut Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dimulai pada tahun 2013. Tujuan daripada PMU sendiri adalah membuka peluang bagi seluruh lapisan masyarakat yang utamanya adalah masyarakat dengan ekonomi lemah guna memperoleh akses ke layanan pendidikan menengah. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah juga menyiapkan rangkaian program Bantuan Operasional

Sekolah Menengah yang akan disalurkan pada seluruh Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan baik yang Negeri ataupun Swasta yang tersebar diseluruh Indonesia. Pemberiana dana secara langsung yang dilaukan pemerintah kepada SMK adalah program utama dari BOS SMK, besaran dana bantuan yang akan diberikan kepada pihak sekolah akan dihitung yang didasari pada jumlah siswa tiap sekolah dan dikalikan dengan besarnya satuan dana bantuan. Bantuan Operasional Sekolah SMK sendiri memiliki tujuan untuk memberikan dukungan atas ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan pendidikan menengah bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya program BOS SMK wajib mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis BOS SMK Tahun 2019 yang mengutamakan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang mengguakan prinsip swakelola dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokrtasi, efektif dan efisien, tertib administrasi dan pelaporan, serta prinsip saling percaya. Guna mengukur sejauh mana hasil dari pelaksanaan 7 prinsip pengelolaan dana BOS, makan penting dilakukannya sebuah analisis. Analisis akan berfungsi sebagai parameter dari tingkat keberhasilan sebuah pelaksanaan dan penentuan dari sebuah kebijakan. Analisis pengelolaan merupakan sebuah analisis guna melakukan penentuan parameter dan tingkat keberhasilan dari pengelolaan sebuah program. SMK Negeri 2 Depok adalah salah satu sekolah yang terdaftar untuk menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK pada tahun 2019. SMK Negeri 2 Depok sebagai penerima dana BOS memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan yang sesuai dengan 7 prinsip pengelolaan dana BOS. Maka dalam penelitian kali ini akan melihat bagaimana analisis pengelolaan dana BOS yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 2 Depok yang didasari 7 prinsip pengelolaan yang ada sesuai dalam Petunjuk Teknis BOS SMK Tahun 2019



Gambar 1 Kerangka Berpikir